

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.1.2.12.21.467 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020-2024

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan, perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

- 3 -

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- 4 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.1.2.12.21.467 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BPOM telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra BPOM memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM perlu melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan BPOM;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2020-2024;
3. Bagi seluruh unit organisasi Eselon I dan satuan kerja di lingkungan BPOM dalam menyusun reviu rencana strategis unit organisasi Eselon I dan satuan kerja Tahun 2020-2024; dan
4. Bagi seluruh unit organisasi Eselon I, unit organisasi Eselon II, dan satuan kerja di lingkungan BPOM dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target baik pada level sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan.

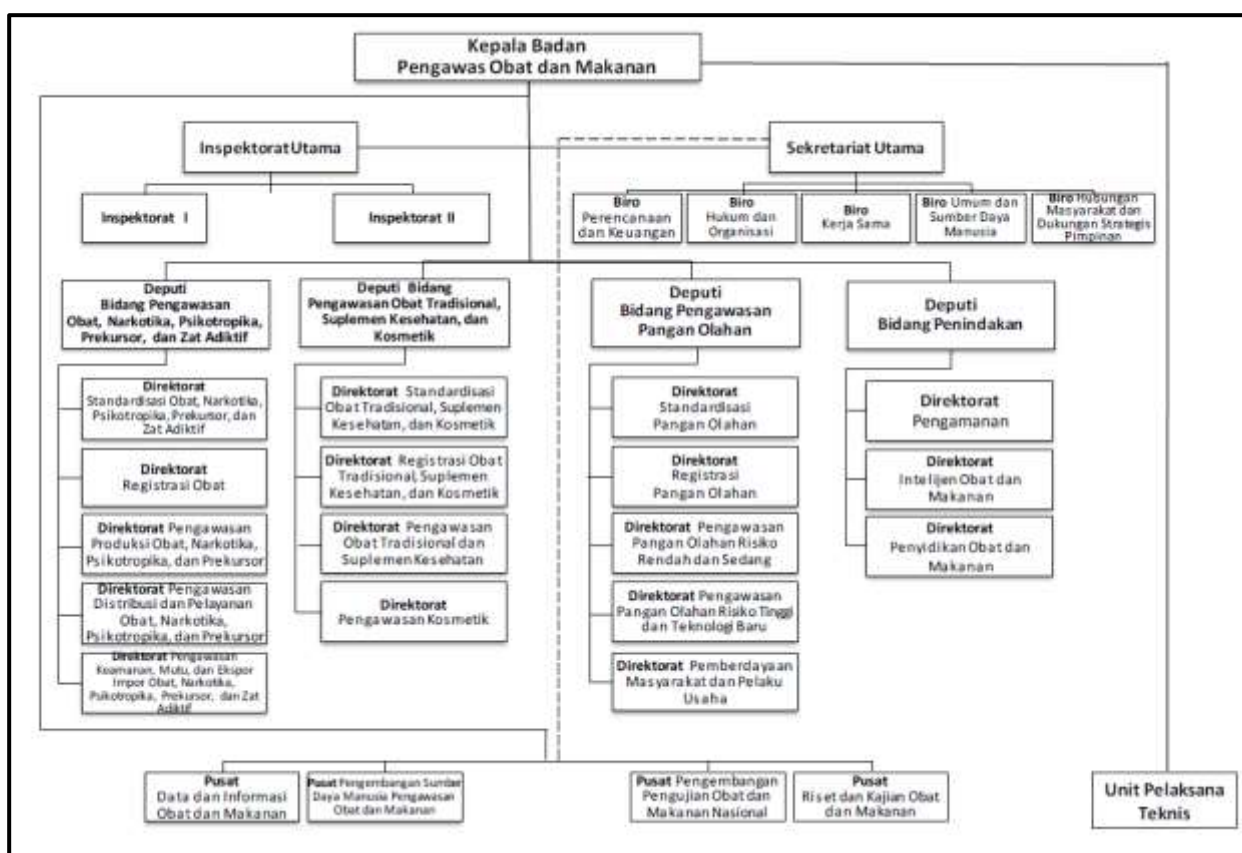
BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

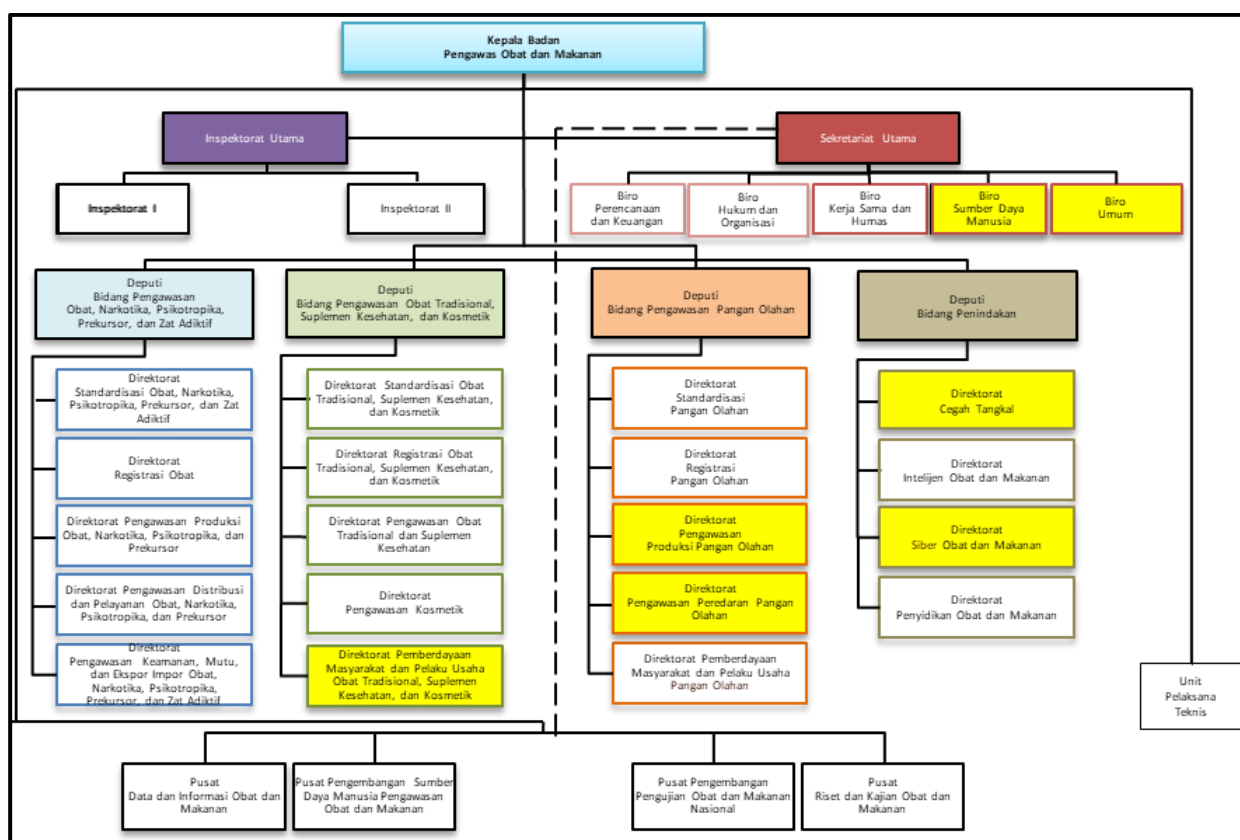
A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM



Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas, secara lebih rinci dapat dijelaskan perubahan organisasi dan tata kerja BPOM sebagai berikut:

a. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

1) Penambahan Unit Kerja Eselon II baru yaitu “Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik”.

2) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Terdapat pengurangan/pelimpahan fungsi pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

3) Direktorat Pengawasan Kosmetik

Terdapat pengurangan/pelimpahan fungsi pembinaan UMKM Kosmetik kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

- b. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
 - 1) Terdapat perubahan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II terkait pengawasan *post market* yang semula berdasarkan komoditi (yaitu: 1. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, dan 2. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang) menjadi berdasarkan fungsi/proses (yaitu: 1. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, dan 2. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan).
 - 2) Penyesuaian nomenklatur “Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha” menjadi “Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan”. Perubahan nomenklatur hanya dengan menambahkan unsur komoditi namun tidak terdapat perubahan tugas dan fungsi.
- c. Deputi Bidang Penindakan
 - 1) Perubahan nomenklatur “Direktorat Pengamanan” menjadi “Direktorat Cegah Tangkal”, namun tanpa adanya perubahan tugas dan fungsi.
 - 2) Penambahan Unit Kerja Eselon II baru yaitu “Direktorat Siber Obat dan Makanan”.
 - 3) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
Terdapat pengurangan/pelimpahan fungsi patroli siber kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan.
- d. Sekretariat Utama
 - 1) Penghapusan “Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan” dan memindahkan fungsi yang ada di dalamnya kepada 3 (tiga) Biro sesuai OTK baru, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, serta Biro Hukum dan Organisasi.
 - 2) Biro Perencanaan dan Keuangan
Terdapat penambahan fungsi Dukungan Strategis Pimpinan yang sebelumnya terdapat pada Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.

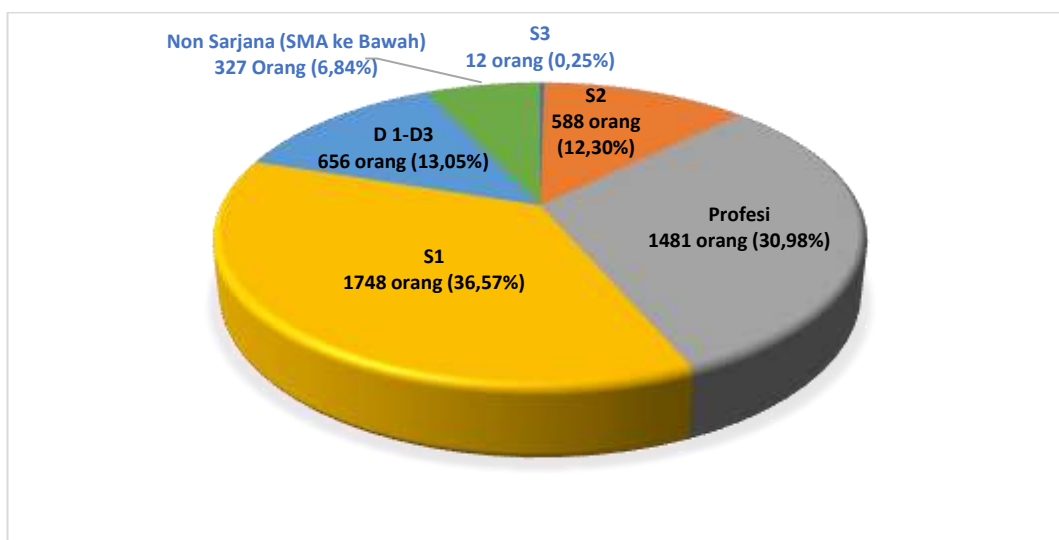
- 3) Biro Hukum dan Organisasi
Terdapat penambahan fungsi pengelolaan pengaduan masyarakat yang sebelumnya terdapat pada Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.
- 4) Perubahan nomenklatur “Biro Kerja Sama” menjadi “Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat” dengan penambahan fungsi hubungan masyarakat yang sebelumnya terdapat pada Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan. Pemisahan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menjadi 2 (dua) Unit Kerja yaitu Biro Umum dan Biro Sumber Daya Manusia.

Implikasi yang paling mendasar terhadap perubahan OTK BPOM tersebut adalah terkait sasaran strategis dan indikator kinerja BPOM, mulai dari level organisasi paling tinggi (lembaga) dan unit kerja di bawahnya. Untuk itu, dilakukan reviu terhadap peta strategi Level 0, 1 dan 2 di Lingkungan BPOM sesuai OTK baru, utamanya pada unit kerja yang terdampak langsung terhadap perubahan struktur organisasi tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan keselarasan sasaran strategis antar unit kerja dan konsistensi cascading sasaran dan indikator.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

Pada Renstra BPOM 2020-2024, BPOM telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 8.676 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM BPOM. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per April 2021 sejumlah 4.812 orang dengan proporsi 72% perempuan dan 28% laki-laki yang tersebar di Unit Pusat dan UPT BPOM di seluruh Indonesia. Jumlah SDM BPOM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, BPOM memerlukan SDM sebesar 9.987 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 5.175 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.



Gambar 3 Tingkat Pendidikan Pegawai BPOM Tahun 2021

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia BPOM, 2021

Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi (apoteker, dokter, dokter gigi, dokter hewan) masih mendominasi. BPOM sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

3. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPOM Tahun 2020

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis I: Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Aman dan Bermutu			
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73	75,45	103,36
Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	90,6	112,13
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	79,68	102,16
Sasaran Strategis II: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan			
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82	80,06	97,63
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72	74,29	103,18
Sasaran Strategis III: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan			
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86,81	105,87
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	72,54	102,17
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86	87	101,16
Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan			
Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71	87,4	123,1
Sasaran Strategis V: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan			
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	87,42	102,85
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	70,76	98,27
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	73,96	134,48
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	71	91,56	105,18
Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3,51	4,04	115,10
Sasaran Strategis VI: Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan			
Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	45	70,31
Sasaran Strategis VII: Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan			
Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	79,06	108,29

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	73	73,75	101,03
Sasaran Strategis VIII: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Kerja sama BPOM yang optimal			
Nilai RB BPOM	81	80,12	98,91
Nilai AKIP BPOM	81	78,60	97,04
Persentase kerjasama yang efektif	82	91,67	111,79
Sasaran Strategis IX: Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal			
Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	82,88	110,51
Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75	72,73	96,97
Sasaran Strategis X: Menguatnya laboratorium, riset analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan			
Indeks SPBE BPOM	3,8	3,68	96,84
Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar kemampuan pengujian	71	72,60	102,25
Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	72,60	100,83
Sasaran Strategis X: Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel			
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100
Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	95,50	102,69

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja BPOM melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 1, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BPOM selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BPOM dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai *baseline* baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, BPOM juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Simplifikasi dan percepatan registrasi obat termasuk vaksin, NIE diberikan dengan skema *Emergency Use Authorization (EUA)*. *Evaluasi pendaftaran obat covid (5 hari kerja) dilakukan lebih cepat dibanding obat non covid (150 hari kerja)*.
- Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan, yang meliputi registrasi obat tradisional klaim penambah daya tahan tubuh, *handwash*, *handgel*.
- Mengawal pengembangan vaksin COVID-19 serta keamanan dan mutu vaksin COVID-19 sebelum dan selama peredaran, antara lain pengawalan dan evaluasi uji praklinik dan uji klinik, inspeksi sarana produksi dan pengawasan sarana distribusi.
- Pembangunan Laboratorium *Biohazard* yang dilengkapi dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.
- Penyusunan dan penerbitan Pedoman Penggunaan Herbal dan Suplemen menghadapi COVID-19.
- Penyusunan dan penerbitan Pedoman Pelayanan Publik di Bidang Obat dalam Kondisi Pandemi COVID-19 untuk meningkatkan akses obat dan memenuhi ketersediaan obat di dalam negeri dengan Percepatan Perizinan di bidang obat.
- Uji cepat menggunakan *rapid test* untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai koordinator dan 33 laboratorium Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan yang telah terakreditasi.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra BPOM 2020-2024, BPOM telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra BPOM tersebut yang perlu dianalisis

lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran BPOM sangat dibutuhkan dalam rangka perizinan dan pengembangan vaksin/obat covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawasan uji klinik yang valid. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), BPOM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
- 2) Peran BPOM dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BPOM masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *timeline* registrasi vaksin dan produk peningkatan daya tahan tubuh.
- 2) Koordinasi dengan peneliti/*stakeholder* terkait dalam pengembangan obat dan vaksin Covid-19 yang belum optimal.
- 3) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/postmarket* obat-obatan tersebut.

- b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**

Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”**

khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.

3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”**

khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana

laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.



Gambar 1. Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.

- 2) Adanya segmentasi kewenangan dan urusan dalam upaya kemandirian industri farmasi dalam negeri menjadi terhambat.
- 3) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, di sisi lain untuk laboratorium di luar BPOM masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 4) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem informasi yang andal.

B. **Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis**

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan BPOM sebagai berikut:

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan BPOM Tahun 2020-2024

Visi BPOM 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

	<ol style="list-style-type: none">2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
--	--

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM, sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 2. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal</p>	<p>1. Indeks Profesionalitas ASN BPOM 2. Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi</p>	<p>Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Penguatan pengelolaan SDM-BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>
		<p>2. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan obat dan makanan</p>	<p>1. Indeks SPBE BPOM 2. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar kemampuan pengujian 3. Persentase riset dan kajian pengawasan</p>		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			Obat dan Makanan yang dimanfaatkan		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
		2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan	1. Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan		
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 2. Persentase Obat yang memenuhi syarat 3. Persentase makanan yang memenuhi syarat	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan		
		3. Meningkatnya kepuasan pelaku	Indeks kepuasan masyarakat atas		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
		4. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap	Persentase putusan pengadilan yang	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	kejahatan Obat dan Makanan.	kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	dinyatakan bersalah	Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	<p>1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan</p> <p>3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang efektif.</p> <p>4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara akuntabel.</p>	<p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM</p> <p>Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan</p> <p>1. Indeks RB BPOM 2. Nilai AKIP BPOM</p> <p>1. Opini BPK atas Laporan</p>	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p> <p>2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			Keuangan BPOM 2. Nilai Kinerja Anggaran BPOM		

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2021

3. Sasaran Strategis dan IKU BPOM

Tidak ada perubahan peta strategi BPOM yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama BPOM Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BPOM yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU BPOM tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BPOM sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategi BPOM 2020-2024

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan BPOM

Dalam hal arah kebijakan BPOM, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BPOM, sebagai berikut:

- Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.
- Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BPOM harus lebih selektif dalam

memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.

- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi BPOM

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BPOM, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BPOM 2020-2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BPOM dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja BPOM yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level 0 BPOM**, **tidak terdapat perubahan** baik pada level sasaran strategis maupun indikator, **namun dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan *baseline* baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 27 (dua puluh tujuh) IKU BPOM, secara umum target tetap dan meningkat. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- a. **Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi**, di mana penurunan target disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengubah jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi jabatan fungsional (JF). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II, hal ini menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi dibanding standar yang telah disusun di awal (2020).
- b. **Indeks SPBE BPOM**, di mana penurunan target di sebabkan adanya perubahan *tools* pengukuran Indeks SPBE K/L yang mencakup perubahan indikator dalam penilaian SPBE dan audit khusus.
- c. **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)**, di mana penurunan target disebabkan adanya penambahan Satker baru yaitu sebanyak 15 Loka Satker Mandiri yang belum memiliki data *baseline* sebagai dasar penetapan target.
- d. **Indeks RB dan Nilai AKIP**. Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap *trend* kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja BPOM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73	76	79	83	85	75,45	80	82	83	85
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	90,60	83,6	92,25	93,5	94,75
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	79,68	80	83	84.2	86
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82	83	84	85	86	80,06	83	84	85	86
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72	75	78	81	83	74,29	77	80	83	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	83.5	85	86.5	88	86,81	88	89	90	91
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	72,54	74	77	80	83
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86	88	89	90	92	87	88,46	89,45	90,35	91,29

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71	76	81	85	90	87,40	88	88,5	89	90
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	89	90	87,42	87,5	88,5	89,5	91
	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	LAPKIN: 70,76 RHPK: 73,5	76,5	77,5	79	81,5
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	62	69	75	82	73,96	62	69	75	82
	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	71	74	77	81	84	91,56	92	93	95	97
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	4,04	4,16	4,28	4,39	4,51
Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	67	70	73	76	45	67	70	73	76

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	77	80	85	89	79,06	82	85	89	92
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	73	75	77	79	81	73,75	75	77	79	81
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	81	85	90	91	92	80,12	83	85	87	89
	Nilai AKIP BPOM	81	85	90	91	92	78,60	81	82	83	84
	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90	LAPKIN: 91,67 DO baru: 83,33	84	86	88	90
Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	77	80	82	85	82,88	83	84	85	86
	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75	82	83	84	85	72,73	77	79	81	83
Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam	Indeks SPBE BPOM	3,8	3,95	4,1	4,25	4,4	3,68	2,57	2,77	2,97	3,17
	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	71	76	81	86	91	72,60	76	81	86	91

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
pengawasan Obat dan Makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82	72,60	75	78	80	82
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	97	95,50	93	93.5	94.5	95.6

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, BPOM melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan BPOM serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BPOM. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Kegiatan BPOM Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
1	-	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
3	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Pengawasan Produksi Pangan Olahan
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
5	-	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber
6	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	-
7	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM
8	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Pengelolaan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BPOM secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi

alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja BPOM 2020-2024.

E. **Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan**

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU BPOM serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja yang dihapus dan di lebur fungsinya ke Unit Kerja lain, pergeseran tugas dan fungsi antar Unit Kerja serta munculnya Unit Kerja baru untuk peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagai berikut:

TABEL 8. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BPOM
PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024
Badan Pengawas Obat dan Makanan							Badan Pengawas Obat dan Makanan											
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu						SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu									
	1.1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73	76	79	83	85	1.1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	75,45	80	82	83	85		Kedeputian I, II, III, IV dan UPT BPOM		
	1.2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	1.2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,60	83,6	92,25	93,5	94,75	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.		
	1.3	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	1.3	Persentase makanan yang memenuhi syarat	79,68	80	83	84,2	86	Pro PN	Kedeputian III dan UPT BPOM		
	SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan						SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan									
	2.1.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	82	83	84	85	86	2.1.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	80,06	83	84	85	86		Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM, PRKOM		
	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72	75	78	81	83	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	74,29	77	80	83	85		Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM, PRKOM		
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan						SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan									

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
		Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan																	
	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	83,5	85	86,5	88		3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,81	88	89	90	91	Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM, PRKOM			
	3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83		3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,54	74	77	80	83	Kedeputian I, II, III, IV, dan UPT BPOM, PRKOM			
	3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	86	88	89	90	92		3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	87	88,46	89,45	90,35	91,29	Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM, Ittama			
	SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan							SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan									
	4.1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71	76	81	85	90		4.1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	87,40	88	88,5	89	90	Kedeputian I, II, III dan Hukor			
	SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan							SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan									
	5.1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	89	90		5.1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,42	87,5	88,5	89,5	91	Kedeputian I, II dan UPT BPOM			
	5.2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		5.2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,76	76,5	77,5	79	81,5	Kedeputian III dan UPT BPOM			
	5.3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	62	69	75	82		5.3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	73,96	62	69	75	82	Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	5.4	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	71	74	77	81	84		5.4	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,56	92	93	95	97			Kedeputian I, II, III, Sekretariat Utama dan UPT BPOM	
	5.5	Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51		5.5	Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	4,04	4,16	4,28	4,39	4,51			Kedeputian I, II, III, Sekretariat Utama dan UPT BPOM	
	SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan							SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan									
	6.1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	67	70	73	76		6.1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	45	67	70	73	76			Kedeputian IV dan UPT BPOM	
	SS 7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan							SS 7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan									
	7.1	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	77	80	85	89		7.1	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	79,06	82	85	89	92			Kedeputian I, II dan III	
	7.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	73	75	77	79	81		7.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	73,75	75	77	79	81			Kedeputian II dan III	
	SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal							SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal									
	8.1	Indeks RB BPOM	81	85	90	91	92		8.1	Indeks RB BPOM	80,12	83	85	87	89		Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek	Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama	

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
																	hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun		
	8.2	Nilai AKIP BPOM	81	85	90	91	92		8.2	Nilai AKIP BPOM	78,60	81	82	83	84		Dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun	Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama	
	8.3	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90		8.3	Persentase kerjasama yang efektif	91,67	84	86	88	90		Target dibawah realisasi 2020 karena terdapat perubahan DO dan telah dilakukan perhitungan realisasi 2020 berdasarkan DO baru tersebut dengan hasil sebesar 83,33%	Sekretariat Utama	
	SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal							SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal									
	9.1	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	77	80	82	85		9.1	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	82,88	83	84	85	86			Sekretariat Utama dan PPSDM	
	9.2	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75	82	83	84	85		9.2	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	72,73	77	79	81	83		Penurunan target disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengubah jabatan administrasi (Eselon III dan IV)	Sekretariat Utama dan PPSDM	

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
																menjadi jabatan fungsional (JF). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II, menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi dibanding standar yang telah disusun di awal (2020).			
	SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan						SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan										
	10.1	Indeks SPBE BPOM	3.8	3.95	4.1	4.25	4.4	10.1	Indeks SPBE BPOM	3,68	2,57	2,77	2,97	3,17		Penurunan target di sebabkan adanya perubahan tools pengukuran Indeks SPBE K/L yang mencakup perubahan indikator dalam penilaian SPBE dan audit khusus	Sekretariat Utama dan Pusdatin		
	10.2	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	71	76	81	86	91	10.2	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	72,60	76	81	86	91			Sekretariat Utama dan PPPOMN		
	10.3	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82	10.3	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat	72,60	75	78	80	82			Sekretariat Utama dan PRKOM		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
									dan Makanan yang dimanfaatkan										
	SS 11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel						SS 11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel										
	11.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	11.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama			
	11.2	Nilai kinerja anggaran BPOM	93	94	95	96	97	11.2	Nilai kinerja anggaran BPOM	95,5	93	93,5	94,5	95,6	Penurunan target disebabkan adanya penambahan Satker baru yaitu sebanyak 15 Loka Satker Mandiri yang belum memiliki data baseline sebagai dasar penetapan target.	Sekretariat Utama			
Program Pengawasan Obat dan Makanan							Program Pengawasan Obat dan Makanan												
	SP 1	Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu						SP 1	Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu										
	1.1	Indeks Pengawasan Obat	82	84	86	88	90	1.1	Indeks Pengawasan Obat	83,63	88	89	90	91		Kedepatian I, IV dan UPT BPOM			
	SP 2	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu						SP 2	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu										
	2.1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional	74	76	78	81	83	2.1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional	77,67	-	-	-	-		Kedepatian II, IV dan UPT BPOM			
	2.2	Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	81	83	85	87	89	2.2	Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	83,91	-	-	-	-		Kedepatian II, IV dan UPT BPOM			
	2.3	Indeks Pengawasan Kosmetik	74	76	78	80	82	2.3	Indeks Pengawasan Kosmetik	80,47	-	-	-	-		Kedepatian II, IV dan UPT BPOM			
								2.4	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	84	86	88	89	Indikator dikompositkan dari 3 komoditi dan				

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
																diselaraskan dengan peta strategi Deputy II. Hal ini untuk memudahkan proses pemantauan kinerja Kedeputian dan <i>tagging</i> kinerja terhadap indikator yang bersifat dampak			
								2.5	<i>Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap</i>	83.33	86,7	90,0	93,3	96,7	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pengawasan OT dan SK, namun dengan adanya Dit. PMPU OT, Kos dan SK maka pencapaian indikator ini didukung oleh 2 Direktorat tersebut. Untuk itu, indikator dinaikan menjadi indikator Deputy/Level Program			
	SP 3	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu						SP 3	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu										
	3.1	Indeks Pengawasan Makanan	77	79	81	83	85	3.1	Indeks Pengawasan Makanan	80,13	81	82	84	86			Kedeputian III, IV dan UPT BPOM		
								3.2	<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar</i>	39	125	200	275	350	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang. Dengan			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
																adanya perubahan OTK di Kedepuitan 3, yang semula berdasarkan komoditi menjadi berdasarkan fungsi yaitu pengawasan produksi dan pengawasan peredaran, maka indikator menjadi didukung oleh 3 Direktorat, yaitu Ditwas Produksi PO, Ditwas Peredaran PO dan PMPU PO. Untuk itu, indikator dinaikan menjadi indikator Deputi/Level Program			
	SP 4	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan						SP 4	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan										
	4.1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	67	70	73	76	4.1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	45	67	70	73	76			Kedepuitan IV dan UPT BPOM		
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									UPT BPOM		
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT								Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT										
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT BPOM	80,8	83,6	86,6	90	92,3	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT BPOM	90,60	83,6	92,25	93,5	94,75	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan	UPT BPOM		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
																dengan target pada RKP 2021.			
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT BPOM	78	80	82	84	86		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT BPOM	79,68	80	83	84,2	86	Pro PN		UPT BPOM	
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing – masing wilayah kerja UPT BPOM	85	86	87	89	90		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing – masing wilayah kerja UPT BPOM	87,42	87,5	88,5	89,5	91			UPT BPOM	
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing – masing wilayah kerja UPT BPOM	72	73	75	76	78		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing – masing wilayah kerja UPT BPOM	70,76	76,5	77,5	79	81,5			UPT BPOM	
									5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87.06	88	89	90	90	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama), dipindahkan ke UPT disesuaikan dengan Unit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi	UPT BPOM	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT									
	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing –masing wilayah kerja UPT	72	75	78	81	83		1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing –	76	79	81	84	86			UPT BPOM	

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
									masing wilayah kerja UPT										
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT										
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT BPOM	83	85	86	87	89		1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT BPOM	88	89	90	91	92		UPT BPOM		
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT BPOM	71	74	77	80	83		2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT BPOM	70,5	74	77	80	83		UPT BPOM		
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	87,2	88,4	89,6	90,5	92		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing –masing wilayah kerja UPT BPOM	87	88,46	89,45	90,35	91,29		UPT BPOM		
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT										
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	87	89	91	93	95		1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88,9	89	91	93	95		UPT BPOM		
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56	60	65	70	75		UPT BPOM		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
		di masing –masing wilayah kerja UPT							di masing –masing wilayah kerja UPT										
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing –masing wilayah kerja UPT BPOM	85	88	91	94	97		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing –masing wilayah kerja UPT BPOM		88	91	94	97		UPT BPOM		
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing –masing wilayah kerja UPT BPOM	50	55	60	65	70		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing – masing wilayah kerja UPT BPOM	44,27	55	60	65	70	Pro PN	UPT BPOM		
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing –masing wilayah kerja UPT BPOM	60	63	66	68	71		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing – masing wilayah kerja UPT BPOM	59	63	66	68	71	Pro PN	UPT BPOM		
									6	Indeks Pelayanan Publik	4	4,16	4,28	4,39	4,51	Pro PN	UPT BPOM		
									7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		-	77	79	81		Merupakan indikator baru pada UPT untuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam indikator tersendiri	UPT BPOM	
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT									
	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	71	74	77	81	84		1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91,56	92	93	95	97		UPT BPOM		
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah	660	1330	2010	2700	3400		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak		1330	2010	2700	3400	Pro PN	UPT BPOM		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
		(PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM							Usia Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM										
	3	Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	211	427	648	874	1105		3	Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM		427	648	874	1105	Pro PN	UPT BPOM		
	4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	84	165	255	350	450		4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM		165	255	350	450	Pro PN	UPT BPOM		
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT										
	1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94		1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		85	100	100	100	Pro PN	UPT BPOM		
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		77	100	100	100	Pro PN	UPT BPOM		
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT										
	1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	65	69	73	77	81		1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	73	69	73	77	81	Pro PN	UPT BPOM		
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan										
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	83	86		1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	72,6	76	81	86	91		UPT BPOM dan PPPOMN		
	2	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	70	75	80	85	90		2	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	69,2	75	80	85	90	Pro PN	UPT BPOM		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif							Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif									Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif			
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat							Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat											
	1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71	76	81	85	90	1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,46	89,6	89,7	89,9	90					
Registrasi Obat							Registrasi Obat									Direktorat Registrasi Obat			
	Obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan							Obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan											
	1	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	70	73	76	79	82	1	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	88,53	88,5	89	89,5	90					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang Registrasi Obat							Meningkatnya Efektivitas Pengawasan <i>Pre Market</i> di bidang Obat											
	1	<i>Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar</i>	63	66	69	72	75	1	<i>Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar</i>	74,90	66	76	77	78	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.			
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor							Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor									Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor			
	Terwujudnya sarana produksi obat yang mandiri							Terwujudnya sarana produksi obat yang mandiri											
	1	Persentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB	50	55	60	65	70	1	Persentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB	53,33	55	60	65	70					

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi Obat berbasis risiko								Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi Obat berbasis risiko										
	1	Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	84	86	88	90	92	1	Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	88,94	86	90	91	92	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.			
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor							Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor									Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Distribusi dan Pelayanan Obat								Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Distribusi dan Pelayanan Obat										
	1	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	70	72	74	76	78	1	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	74.68	75	77	79	81					
	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat								Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat										
	1	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	80	81	82	83	84	1	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	85.24	81	86	87	88	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang distribusi obat								Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang distribusi obat										
	1	Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi	78	80	82	84	86	1	Persentase Keputusan Penilaian Sarana	84.07	80	86	88	90	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
		Obat yang Diselesaikan tepat waktu							Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu								rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.		
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif							Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif									Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif			
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan NPP dalam rangka penjaminan mutu keamanan informasi Obat dan NPP serta promosi obat							Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan NPP dalam rangka penjaminan mutu keamanan informasi Obat dan NPP serta promosi obat										
	1	Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	93	93,5	94	94,5	95		1	Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	86	86,5	87	87,5	88				
		Kepatuhan industri produk tembakau yang tinggi terhadap aturan terkait label, promosi, dan iklan produk tembakau							Kepatuhan industri produk tembakau yang tinggi terhadap aturan pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau										
	1	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam iklan dan label	46	47	48	49	50		1	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	45,13	47	48	49	50				
		Meningkatnya efektivitas pengawasan produk tembakau							Meningkatnya efektivitas pengawasan produk tembakau										
	1	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60000	60200	60400	60600	60800		1	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	59789	60200	60400	60600	60800	Pro-PN			
		Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor Obat dan NPP							Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor Obat dan NPP										
	1	Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	16300	16500	16700	16900	17100		1	Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18550	16500	18100	18200	18200	Pro-PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
								promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan											
	1	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	77	80	83	86	89	1	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	77,36	80	83	86	89					
	2	Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	83,3	86,7	90,0	93,3	96,7									Indikator dihapus dan dipindahkan ke Deputi/Level Program karena merupakan gabungan/kontribusi 2 Unit Kerja yaitu Dit. Pengawasan OT dan SK, dan Dit. PMPU OT, Kos dan SK			
	3	Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	62	63	64	65	66	2	Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	59,12	63	64	65	66					
Pengawasan Kosmetik								Pengawasan Kosmetik								Direktorat Pengawasan Kosmetik			
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik							Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik											
	1	Persentase sarana Kosmetik yang memenuhi ketentuan	80	81	82	83	84	1	Persentase sarana Kosmetik yang memenuhi ketentuan	80	86	87	88	89					
	2	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	85	86	87	88	89									Indikator dihapus dan dipindahkan ke Deputi/Level Program karena merupakan gabungan/kontribusi 2 Unit Kerja yaitu Dit. Pengawasan Kosmetik, dan Dit. PMPU OT, Kos dan SK. Indikator ini			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	1	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	80	81	82	83	84		1	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	89,98	85	90	91	92		Target 2021 di bawah realisasi karena jika dihitung realisasi tahun 2020 terhadap target 2021 masih dalam kategori baik yaitu 94%		
	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan								Meningkatnya efektifitas pengawasan <i>pre market</i> di bidang Pangan Olahan										
	1	<i>Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>	78	79	80	81	82		1	<i>Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>	89,68	79	90	91	92	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.		
Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang																		Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang (OTK Lama)	
	Kualitas pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang di Daerah yang Optimal																		
	1	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Pangan Olahan	54	65	75	84	95												
	2	<i>Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar</i>	50	125	200	275	350											Indikator dinaikan menjadi indikator Deputy/Level Program karena didukung oleh 3 Direktorat, yaitu Ditwas Produksi PO, Ditwas	

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024
																Peredaran PO dan PMPU PO.		
	3	Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar	65	70	74	76	78											
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang																	
	1	Persentase sarana produksi dan distribusi Pangan Olahan Resiko Rendah dan Sedang yang dilakukan pendalaman mutu dan memenuhi ketentuan	50	60	70	75	80											
	2	Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	88	89	90	90										Indikator dipindahkan pada kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	
							Pengawasan Peredaran Pangan Olahan										Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
									Kualitas pengawasan Peredaran Pangan Olahan di Daerah yang optimal									
									1 Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	-	65	75	84	95				
									Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang Peredaran Pangan Olahan									
									1 Jumlah sarana peredaran yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	-	210	280	350	420				
Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru																	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan	

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
								1	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	-	51	58	65	72					
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha																			
	Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan															Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Lama)			
	1	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	50	52	54	56	58												
	2	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTTP	30	32	35	37	40												
	3	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	80	82	84	86	88												
	Pemberdayaan stakeholder di daerah yang Optimal																		
	1	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	80	160	240	320	400												
							Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan									Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan			
									Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan										
								1	Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	51.25	52	-	-	-					
								2	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK sesuai dengan pedoman	-	-	70	72	74					

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
									Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan										
								1	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	33,77	32	35	37	40		Tidak dilakukan perubahan target ditahun 2021 karena jika dihitung realisasi tahun 2020 terhadap target 2021 masih sesuai yaitu 105% sehingga tidak dilakukan perubahan.			
								2	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	63	160	240	320	400					
									Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan										
								1	Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	94,51	94.5	95	95.5	96					
Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan							Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan									Direktorat Cegah Tangkal			
	Terwujudnya upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif							Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif											
	1	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60	62,5	65	67,5	70	1	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	-	70	75	80	85					
	2	Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80	81	82	83	84												
Intelijen Obat dan Makanan							Intelijen Obat dan Makanan									Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas								Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas										
	1	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	75	78	80	83	85		1	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	77,3	78	80	83	85				
							Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber									Direktorat Siber Obat dan Makanan			
									Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Efektif										
									1	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	80	83	85	87				
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan							Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan									Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan			
	Meningkatnya kualitas penyidikan Obat dan Makanan								Meningkatnya kualitas penyidikan Obat dan Makanan										
	1	Tingkat keberhasilan penyidikan Obat dan Makanan	50	52	54	56	58		1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	64	64	66	68	70				
Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan							Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan									Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan			
	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan								Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan										
	1	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar <i>Kemampuan Pengujian</i>	71	76	81	86	91		1	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/ Pengujian	72,6	76	81	86	91				
	2	<i>Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan penguatan Balai POM</i>		5	20	30	40		2	<i>Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan penguatan Balai POM</i>	-	5	20	30	40	Pro PN			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan							Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan									Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan			
	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas							Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas											
	1	Persentase riset dan kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82	1	Persentase riset dan kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72,60	75	78	80	82	Pro PN				
Program Dukungan Manajemen							Program Dukungan Manajemen												
	SP 1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama						SP 1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM										
	1.1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41	43,25	46,39	47,21	47,86	1.1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama		32,03	33,21	34,40	35,58		Sekretariat Utama			
	1.2	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1.2	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Sekretariat Utama			
	1.3	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	76,73	81,08	81,93	82,8	1.3	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama		72,44	73,33	74,22	75,14		Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama			
								1.4	Nilai kinerja anggaran BPOM	95,5	93	93,5	94,5	95,6	Penurunan target disebabkan adanya penambahan Satker baru yaitu sebanyak 15 Loka Satker Mandiri yang belum memiliki data <i>baseline</i> sebagai dasar penetapan target				
	SP 2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama						SP 2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama										

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	2.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	83	86	89	92		2.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	85,3	87	88	89	90			Sekretariat Utama	
	2.2	Indeks Kepuasan Media	73	73,5	74	74,5	75		2.2	Indeks Kepuasan Media	74,02	74	74,5	75	75,5			Sekretariat Utama	
	2.3	Indeks Opini Publik BPOM	66	67	68	69	70		2.3	Indeks Opini Publik BPOM	79,6	78	79	80	81		Target 2021-2022 dibawah realisasi 2020 karena terdapat penambahan jumlah responden di tahun 2021 sebesar 6,67% dari tahun 2020	Sekretariat Utama	
	SP 3	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif							SP 3	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif									
	3.1	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90		3.1	Persentase kerjasama yang efektif	91,67	84	86	88	90		Target dibawah realisasi 2020 karena terdapat perubahan DO dan telah dilakukan perhitungan realisasi 2020 berdasarkan DO baru tersebut dengan hasil sebesar 83,33%	Sekretariat Utama	
	SP 4	Terwujudnya Organisasi BPOM yang efektif							SP 4	Terwujudnya Organisasi BPOM yang efektif									
	4.1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	9,35	10,17	11,10	11,18	11,41		4.1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,35	5,98	6,02	6,06	6,10			Inspektorat Utama	
	4.2	Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	7,75	8,28	8,94	9,07	9,20		4.2	Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	7,77	8,56	8,66	8,77	8,88			Inspektorat Utama	
	4.3	Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mitra Kerja Inspektorat Utama	3,4	3,7	4	4,2	4,4		4.3	Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3,0	3	4	4	4			Inspektorat Utama	

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	SP 5	Terkelolanya keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel							SP 5	Terkelolanya keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel									
	5.1	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%		5.1	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,06	<1%	<1%	<1%	<1%		Inspektorat Utama		
	5.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88	90	92	94	95		5.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,47	92.5	93	94	95		Terdapat penyesuaian target ditahun 2021 dengan mempertimbangkan hasil <i>benchmark</i> ke beberapa kementerian, <i>trend</i> jumlah temuan BPK yang cenderung meningkat, serta trend capaian tahun sebelumnya.	Inspektorat Utama	
Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan							Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan									Biro Perencanaan dan Keuangan			
	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BPOM di lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan								Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BPOM di lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan										
	1	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,90	5,25	5,60	5,66	5,70		1	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas		4,22	4,48	4,74	5,00				
	2	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,25	76,73	81,08	81,93	82,80		2	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM		72,44	73,33	74,22	75,14				
	3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93	94	95	96	97		3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM		94	95	96	97				
	4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	94,24	94,87	95,22	95,57	95,92		4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM		94,87	95,22	95,57	95,92				

SEMULA							MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023				2024	
	5	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	100	100	100	100	100		5	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP		100	100	100	100				
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan								-				-	-	-	-	-	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan (OTK Lama)	
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Biro Humas dan DSP						-	-			-	-	-	-	-	-		
	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	83	86	89	92	-	-			-	-	-	-	-	-	Indikator dipindahkan pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	
	2	Indeks kepuasan media	73	73,5	74	74,5	75	-	-			-	-	-	-	-	-	Indikator dipindahkan pada kegiatan Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	
	3	Indeks opini publik BPOM	66	67	68	69	70	-	-			-	-	-	-	-	-	Indikator dipindahkan pada kegiatan Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana							Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana									Biro Hukum dan Organisasi			
	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Biro Hukum dan Organisasi							Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi											
	1	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3,40	3,80	4,50	4,60	4,75	1	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan		4,29	4,64	4,69	4,75					
	2	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,40	4,90	5,50	5,55	5,70	2	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi		6,43	6,96	7,03	7,13					
	3	Nilai RB BPOM Penataan tata laksana	4,20	4,4	4,65	4,70	4,75	3	Nilai RB BPOM Penataan tata laksana		5,36	5,80	5,86	5,94					
								4	Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		5,67	5,76	5,85	5,94					
								Meningkatnya kepuasan masyarakat dan Internal BPOM terhadap kinerja Layanan Biro Hukum dan Organisasi											
								1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	-	87	88	89	90					
Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM							Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM									Biro Kerjasama dan Humas			
	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global							Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global											
	1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan	72	73	74	75	76	1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti oleh mitra dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa	83,33	84	86	88	90					
								2	Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional, dan Multilateral	-	84	86	88	90					

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	Target							
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024				
								Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas									
								1 Indeks kepuasan media	74,02	74	74,5	75	75,5				
								2 Indeks opini publik BPOM	79,6	78	79	80	81		Target 2021-2022 dibawah realisasi 2020 karena terdapat penambahan jumlah responden di tahun 2021 sebesar 6,67% dari tahun 2020		
	Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)							Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)									
	1	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	2	2	2	2	1 Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	1	2	2	2	2	Pro PN			
Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM							Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM									Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (OTK Lama)	
	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM sesuai roadmap RB BPOM							-	-	-	-	-	-				
	1	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,2	13,6	14,1	14,2	14,26	-	-	-	-	-	-		Indikator dipindahkan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia		
	2	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	80	82	84	86	88	-	-	-	-	-	-		Indikator dipindahkan pada kegiatan		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
																Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			
							Pengelolaan Sumber Daya Manusia												Biro Sumber Daya Manusia
								Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro SDM											
								1	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	-	5,13	5,59	6,04	6,50					
								2	Indeks Sistem Merit	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4					
							Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM												Biro Umum
								Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Umum											
								1	Nilai Pengawasan Kearsipan	85,71	90	91	92	93					
								2	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	78,99	80	82	84	86					
								3	Persentase Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	64	66	68	70					
Pengembangan SDM Aparatur BPOM							Pengembangan SDM Aparatur BPOM											Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	
	Meningkatnya kompetensi SDM POM							Meningkatnya kompetensi SDM POM											
	1	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	75	82	83	84	85	1	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	72.73	77	79	81	83					
	Tersedianya Profil Kompetensi SDM POM yang Mutakhir sesuai Standar																		
	1	Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	770	820	875	935	1000	2	Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	537	820	875	935	1000					

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	Terwujudnya RB BPOM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map RB BPOM 2020-2024								Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024										
	1	Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	3,90	4,30	4,65	4,70	4,75		1	Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan		4,61	4,66	4,71	4,75				
Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan							Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan									Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan			
	Terwujudnya sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal								Terwujudnya sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal										
	1	Indeks SPBE BPOM	3.8	3.95	4.1	4.25	4.4		1	Indeks SPBE BPOM	3,68	2,57	2,77	2,97	3,17	Penurunan target di sebabkan adanya perubahan <i>tools</i> pengukuran Indeks SPBE K/L yang mencakup perubahan indikator dalam penilaian SPBE dan audit khusus			
									2	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	100	100	100	100	100				
	Terintegrasinya Sistem IT BPOM								Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan										
	2	Persentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	35	55	70	85	100		1	Persentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	25	55	70	85	100				
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I							Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I									Inspektorat I			
	Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif								Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif										
	1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	9,35	10,17	11,10	11,18	11,41		1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan		5,98	6,02	6,06	6,10				

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024
	1	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inpektorat II	<1	<1	<1	<1	<1		1	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inpektorat II	0,44	<1	<1	<1	<1			

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra BPOM dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BPOM yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BPOM.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BPOM yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BPOM masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

- a. Hasil reviu Renstra BPOM 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BPOM serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BPOM.
- b. Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM agar melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra BPOM ini.

BAB III
PENUTUP

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BPOM tersebut. Reviu Renstra BPOM dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BPOM sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BPOM agar memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Selain itu, Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM juga perlu melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra masing-masing dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BPOM ini, diharapkan BPOM terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO